

TESIS

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
DALAM PEMENUHAN HAK ANAK ATAS IDENTITAS DIRI
BERUPA AKTA KELAHIRAN**



MARTINUS AGUS HUTORO
Nomor Mahasiswa : 105201522/PS/MIH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2013



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : MARTINUS AGUS HUTORO
Nomor Mahasiswa : 105201522/PS/MIH
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Ketatanegaraan
Judul : Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Anak Atas Identitas Diri Berupa Akta Kelahiran

Nama Pembimbing
Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni. S.H., M. Hum.

Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M. Hum.

Tanggal

10 Mei 2013

13 Mei 2013

Tanda tangan


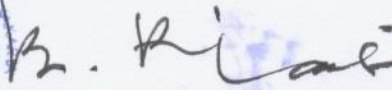


UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : MARTINUS AGUS HUTORO
Nomor Mahasiswa : 105201522/PS/MIH
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Ketatanegaraan
Judul : Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Anak Atas Identitas Diri Berupa Akta Kelahiran

Nama Penguji	Tanggal	Tanda tangan
Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni. S.H., M. Hum. (Ketua)	10 Mei 2013	
Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M. Hum. (Sekretaris)	13 Mei 2013	
Y. Hartono, SH., M.Hum.. (anggota)	10-Mei 2013	

**Ketua Program Studi**

B. Bambang Riyanto, SH., M.Hum.
PROGRAM
PASCASARJANA

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya, MARTINUS AGUS HUTORO, menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Atma Jaya maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari Penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nara sumber penulis secara benar dan semua isi Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Sleman, 9 Mei 2013

Penulis,



MARTINUS AGUS HUTORO

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk: *pertama*, mengetahui dan mengevaluasi tanggung jawab Pemerintah dalam pemenuhan hak anak atas identitas diri berupa akta kelahiran; *kedua*, mengetahui dan mengevaluasi apa yang menjadi kendala bagi Pemerintah dalam upaya melaksanakan tanggung jawab memenuhi hak anak atas identitas diri berupa akta kelahiran; *ketiga*, mengetahui dan mengevaluasi harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pencatatan kelahiran serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan politik hukum dan sosiologi hukum. Proses analisa terhadap bahan-bahan hukum dimulai dari bahan hukum primer dengan melakukan deskripsi bahan-bahan hukum, sistematisasi bahan-bahan hukum, sinkronisasi bahan-bahan hukum, interpretasi bahan-bahan hukum serta dalam tataran teori hukum melakukan evaluasi terhadap bahan-bahan hukum.

Tanggung jawab pemerintah pusat dalam pemenuhan hak anak atas identitas diri berupa akta kelahiran adalah tanggung jawab dalam menjalankan perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menetapkan Peraturan Pemerintah, serta menyusun Peraturan Presiden. Presiden dibantu oleh menteri yang tugasnya membidangi urusan pemerintahan yang terkait dengan penyelenggaraan pencatatan sipil.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyusun peraturan tentang administrasi kependudukan yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang diundangkan pada tanggal 24 Oktober 2007. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah.

Kendala bagi pemerintah dalam upaya melaksanakan tanggung jawab memenuhi hak anak atas identitas diri berupa akta kelahiran meliputi aturan hukum tentang asas peristiwa, masih banyak masyarakat yang enggan atau belum mensegerakan mencari akta kelahiran ketika terjadi peristiwa kelahiran, Kepala Dinas adalah satu-satunya pejabat pencatatan sipil, kurangnya jumlah personil petugas pelayanan akta kelahiran, Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tidak mengatur tentang standar pelayanan minimal pelaksanaan penerbitan akta kelahiran, dan kewajiban lewat Penetapan Pengadilan bagi penduduk yang terlambat pelaporan kelahiran lebih dari 1 (satu) tahun menyebabkan penduduk semakin enggan mengurus akta kelahiran.

Ada disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang pelaksanaan pembuatan akta kelahiran serendah-rendahnya di tingkat Kelurahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di tingkat Kecamatan.

Kata-kata kunci : tanggung jawab pemerintah, hak anak atas identitas diri, akta kelahiran, administrasi kependudukan

ABSTRACT

This study aims to: first, knowing and evaluating the responsibilities of the government in the fulfillment of children's right to self-identity in the form of a birth certificate, secondly, to know and evaluate what the problem is for the government in an effort to carry out the responsibilities of fulfilling children's right to self-identity in the form of a birth certificate; Third, identify and evaluate the harmonization of the Law No. 23 Year 2006 concerning Population Administration with Law No. 23 Year 2002 on Child Protection, which mandates the government's responsibility in the implementation of service delivery as low birth registration at the village level.

Types of research used in this study is a normative legal research. Legal approach used in this study is the approach to the politics of law and sociology of law. Process analysis of legal materials starting from primary legal materials by descriptions of legal materials, systematization of legal materials, legal materials synchronization, interpretation of legal materials and the level of legal theory to evaluate legal materials.

Responsibility of the central government in the fulfillment of children's right to self-identity in the form of a birth certificate is the responsibility of the command of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 that the President passed the Act No. 23 of 2006 concerning Population Administration, issued Government Regulation, and to develop regulations President. President assisted by the minister in charge of government affairs duties related to the conduct of civil registration.

Yogyakarta city government has established regulations on the administration of the population of Yogyakarta Regulation No. 7 of 2007 on the Implementation of the Population Administration promulgated on October 24, 2007. Implementation organizing paperwork population in the city of Yogyakarta Yogyakarta Regional Regulation No. 10 Year 2008 on the establishment, composition, and Duty Position Regional Office.

Obstacles for the government to carry out the responsibilities of fulfilling children's right to self-identity in the form of a birth certificate include the rule of law on the principle of the events, there are still many people who are reluctant or not mensegerakan looking for a birth certificate in the event of a birth, the Head of Department is the only official civil registration, shortage of personnel services officer birth certificate, Every resident subject to administrative sanctions in the form of fines, Yogyakarta Regulation No. 7 of 2007 on the Implementation of Population Administration does not regulate the implementation of minimum service standards issuance of birth certificates, and obligations of the Stipulation by the Court for the people who are late reporting of births more than 1 (one) year caused the population to be increasingly reluctant to take care of a birth certificate.

There is disharmony between Law No. 23 of 2002 on Child Protection on the implementation of the birth certificate as low at village level to the Law No. 23 Year 2006 concerning Population Administration at the District level..

Key words: responsibility of the government, the right of the child to self-identity, birth certificates, population administration

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya penulisan tesis ini dengan Judul:

“TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK ANAK ATAS IDENTITAS DIRI BERUPA AKTA KELAHIRAN”.

Penulis hendak mengetahui segala permasalahan yang terkait dengan tanggung jawab dan kendala pemerintah dalam upaya pemenuhan hak anak atas identitas diri berupa akta kelahiran serta harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penulis hendak mengkaji secara yuridis lebih mendalam ke dalam suatu karya ilmiah ini.

Selain itu, penulisan tesis ini juga merupakan tugas akhir sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, guna mencapai gelar Magister Humaniora pada Program Pascasarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini :

1. Bapak DR. ROGATIANUS MARYATMO, M.A., Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Drs. M. PARNAWA PUTRANTA, MBA., Ph.D., Direktur Progam Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Bapak DR. RIAWAN TJANDRA W., S.H. M.Hum., Mantan Direktur Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak BAMBANG RIYANTO B., S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Ibu PROF. DR. Dra. MG. ENDANG SUMIARNI, S.H., M.Hum., Dosen pembimbing utama yang dengan sabar sudi memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Y. SRI PUDYATMOKO, S.H., M.Hum., Dosen pembimbing kedua yang dengan sabar sudi memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Admisi Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Studi Pascasarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah banyak membantu dalam penyelenggaraan proses studi penulis.
8. Bapak H. WIDORISNOMO, SH., MT., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta periode November 2010 sampai dengan September 2011 yang telah memberikan ijin bagi penulis untuk melanjutkan pendidikan Strata 2.
9. Bapak H. NUR AFFANDI, SH., M.Hum., Almarhum adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta periode Oktober 2011 sampai dengan Februari 2012 yang telah memberikan ijin bagi penulis untuk proses pendidikan Strata 2.
10. Bapak MUHAMMAD SARJONO, SH, Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta periode Maret 2012 yang telah

memberikan ijin bagi penulis untuk proses pendidikan Strata 2.

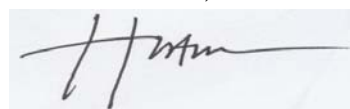
11. Bapak ARBAK YHOGA WIDODO, SE.,MM., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta periode April 2012 sampai dengan Februari 2013 yang telah memberikan ijin bagi penulis untuk proses pendidikan Strata 2.
12. Bapak Drs. H. ACHMAD FADLI, Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang telah memberikan ijin bagi penulis untuk proses pendidikan Strata 2.
13. Bapak Drs. H. SISRUWADI, SH., M.Kn. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang telah memberikan ijin bagi penulis untuk proses pendidikan Strata 2.
14. Bapak Drs. RUDI FIRDAUS, MBA, MSi., Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta periode Januari 2011 sampai dengan Maret 2012 selaku atasan langsung penulis yang telah memberikan ijin bagi penulis untuk proses pendidikan Strata 2.
15. Bapak Drs. SUGENG DARMANTO, Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta selaku atasan langsung penulis yang telah memberikan ijin bagi penulis untuk proses pendidikan Strata 2.
16. Ibu MC. NINING HERI SETYOWATI, SH., Kepala Seksi Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta selaku rekan kerja penulis yang telah memberikan banyak masukan khususnya dalam penyusunan thesis ini.

17. Th. Sutirah, Ibuku dan R. Soeparno, Mertuaku, atas segala do'anya.
18. Yenny Patnasari, SE., M.Si. Istriku, Dios Adventura dan Den Duahart anak-anaku, atas segala dukungannya, '*and my spirit*'.
19. Rekan-rekan Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Studi Pascasarjan Universitas Atma Jaya Yogyakarta angkatan Januari 2011, terima kasih atas persahabatan dan persaudaraannya.
20. MC. Nining Heru S., Kepala Seksi Pelayanan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta atas dukungan dan bantuannya.
21. Seluruh Karyawan dan Karyawati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, rekan kerja Penulis, terima kasih atas dukungan dan do'anya.
22. Serta semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan secara keseluruhan.

Semoga tesis ini dapat memberikan sumbangsih pada masyarakat sebagai ilmu pengetahuan. Jika dalam penulisan tesis ini terdapat kesalahan serta ketidaksempurnaan, maka hal tersebut bukan merupakan kesengajaan, melainkan karena kekhilafan penulis, karenanya kepada siapapun yang membaca tesis ini penulis mohon agar memaklumi dan memberikan kritik yang dapat membangun.

Yogyakarta, 4 April 2013

Penulis,



MARTINUS AGUS HUTORO

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
INTISARI	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Masalah	10
D. Keaslian Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	20
F. Tujuan Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI	
A. Tinjauan Pustaka	25
1. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Anak	25
2. Hak Anak atas Identitas Diri berupa Akta Kelahiran	33
B. Landasan Teori	39
1. Teori Kebijakan Publik	39
a. Pengertian	39
b. Hubungan Hukum dan Kebijakan Publik	44
c. Penerapan Hukum dan Kebijakan Publik	46
2. Teori Pelayanan Publik	51
a. Hukum Pelayanan Publik	51
b. Negara Hukum Berdimensi Pelayanan Publik	55
c. Asas Kebebasan Bertindak <i>Freis Ermessen</i>	56
d. Asas-Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	61
3. Teori Hak	63
a. Hak Mutlak	64
b. Hak Nisbi	65
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Penelitian Hukum Normatif	66
1. Pendekatan Politik Hukum	67
2. Pendekatan Sosiologi Hukum	68

B. Bahan Hukum	70
1. Bahan Hukum Primer	70
2. Bahan Hukum Sekunder	73
3. Bahan Hukum Tersier	75
C. Analisa	75

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

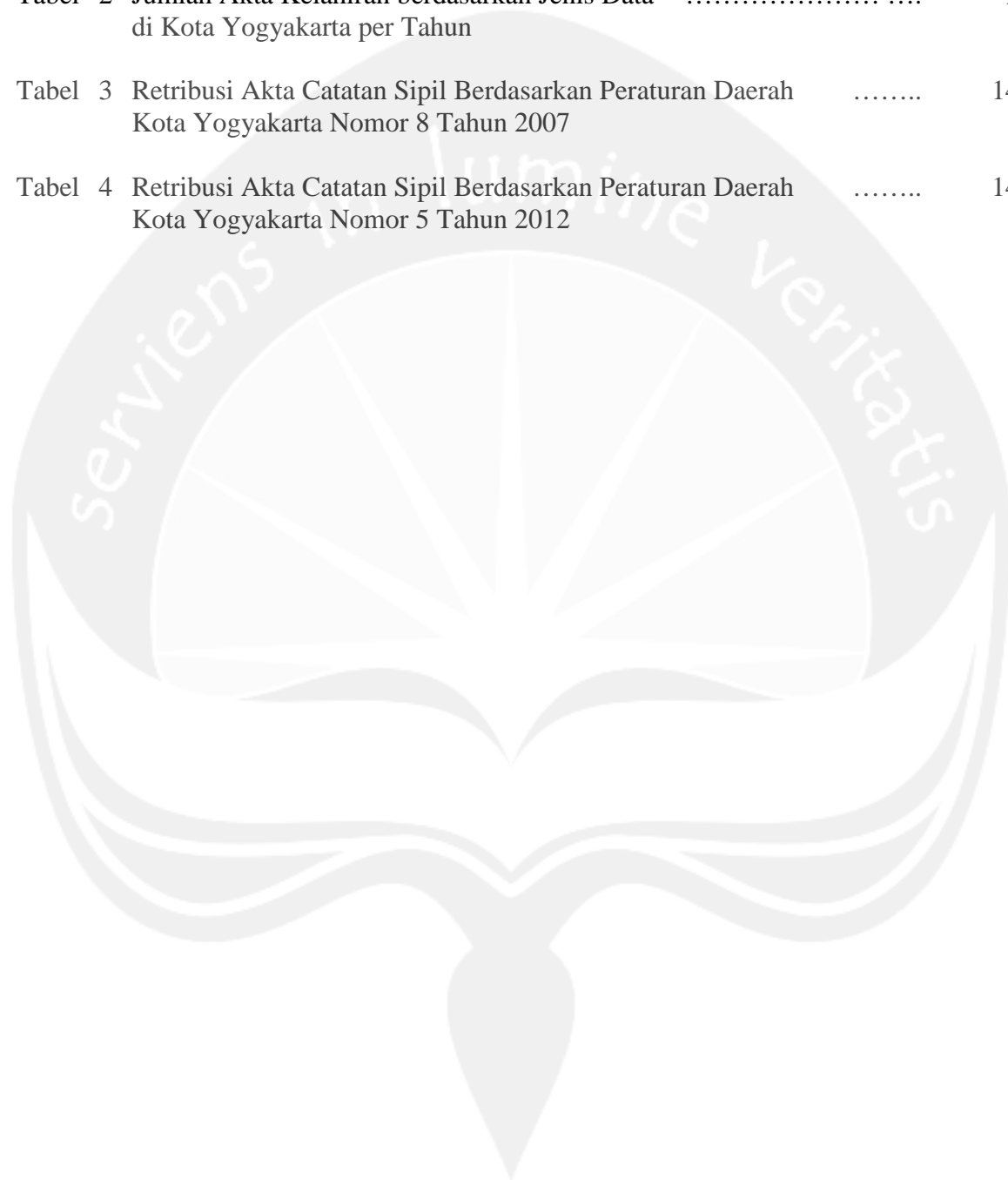
A. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pelayanan	79
Permohonan Akta Kelahiran di Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta	
1. Bidang Pencatatan Sipil.....	79
2. Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian	82
B. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Anak	96
atas Identitas Diri berupa Akta Kelahiran	
1. Tanggung Jawab Pemerintah Pusat	96
2. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah	106
C. Kendala bagi Pemerintah dalam Upaya Melaksanakan	115
Tanggung Jawab Memenuhi Hak Anak atas Identitas Diri berupa Akta Kelahiran	
1. Penerapan Hukum	115
2. Unsur Struktural	121
3. Unsur Masyarakat	123
4. Unsur Budaya	124
D. Harmonisasi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006	133
tentang Administrasi Kependudukan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	147
1. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Anak	147
atas Identitas Diri berupa Akta Kelahiran	
a. Tanggung Jawab Pemerintah Pusat	147
b. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah	150
2. Kendala bagi Pemerintah dalam Upaya Melaksanakan	152
Tanggung Jawab Memenuhi Hak Anak atas Identitas Diri berupa Akta Kelahiran	
3. Harmonisasi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006	154
tentang Administrasi Kependudukan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	
B. Saran	156

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Bayi Lahir Hidup Tahun 2007 sampai dengan 2012 Di Kota Yogyakarta (jiwa)	91
Tabel 2	Jumlah Akta Kelahiran berdasarkan Jenis Data di Kota Yogyakarta per Tahun	92
Tabel 3	Retribusi Akta Catatan Sipil Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2007	143
Tabel 4	Retribusi Akta Catatan Sipil Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012	144



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Konsep Teoritis	78
Gambar 2	Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta	88

